

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Muhaimin, 2020 *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press. Mataram.

H. Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta Cv. Bandung

Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Mirra Buana Media. Yogyakarta

Bachtiar, 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press. Pamulang.

M. Hadi Subhan. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*.
Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.

B. Jurnal:

“Konsep Keadilan Voting dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol.3 No.1. 2023

A.K Sikri, “Cross Border Insolvency: Court-to-Court Cooperation.” *Journal of the Indian Law Institute*, Vol. 51 No. 4, 2009.

Abdullah Widy Asshidiq, Rifki Yustisio, And M. Hilmi Miftahzan Reza,
“Kekuatan Hukum Badan Hukum Yang Berbentuk Koperasi Dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan,” *Realism: Law Riview*

Achmad Sidik Jamaludin, “Keabsahan Perdamaian Kedua Oleh Debitor Pailit Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPu)” Vol. 6,
No. 1 2023

Adolf Theodore B. Simanjuntak, “Kedudukan Perjanjian Sewa Dalam Upaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Hukum Agitha Putri Indonesia*. Vol 2, No. 4 (2023):

Agitha Putri Andany Hidayat Agitha, Anita Afriana. “Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*. Vol.3, No. 1. 2021

Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, Putu Sekarwangi Saraswati. “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Mengenai PKPU dalam Hal Debitur Pailit di Masa Covid-19.” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 12, No. 1. 2021.

Alvita Novanilia And Elza Syarief, “Quo Vadis Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Journal Of Law And Policy Transformation* 6, No. 2 (2022)

Alvita Novanilia, Elza Syarief. “Quo Vadis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Journal of Law and Policy Transformation* Vol. 6, No. 2 2022

Amadeo Tito Sebastian, Habib Adjie. "Hak Ahli Waris Warga Negara Asing atas Obyek Waris berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri." *Al'Adl*, Vol. 10 No.2. 2018

Amanda Atika Yuliani Puteri, "Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Debitur yang Meninggal dan Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Andrian dan Gunardi Liet, "IUS Constituendum Of Cross-Border Insolvency Regulation In Asean (Analysis Of The Uncitral Model Law On Cross-Border Insolvency And The European Union Regulation On Insolvency Proceedings)", *Eduvest-Journal of Universal Studies*, Vol. 4, No. 6, 2024

Annisa Fitria. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan", *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 15, No. 1, April, 2018.

Arjan Kumar Sikri, "CROSS BORDER INSOLVENCY: COURT-TO-COURT COOPERATION", *Journal of the Indian Law Institute*, Vol. 51, No.4, 2009.

Atika Ismail. "Analisis Alternatif Restruturisasi Utang atau Penutupan Perusahaan pada Pandemi Covid-19 melalui PKPU." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Vol. 3, No. 1. 2021

B.G.M. Widipradnyana Arjaya . "Wewenang Kejaksaan sebagai Pemohon Pailit untuk Kepentingan Negara terhadap Utang Pajak Subyek Hukum dari Negara Anggota ASEAN Non-Indonesia Pasca Berlaku AEC." *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 3 No. 2 . 2014

*Corporate Law Economic Reform Program Proposals for Reform: Paper No. 8:
Cross-Border Insolvency Promoting international cooperation and
coordination.*

Devi Andani And Wiwin Budi Pratiwi, "Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, No. 3 (2021)

Dewi Ayu Pambudi, "Tanggungjawab Ahli Waris Debitur Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di PT BNI Sentra Kredit Kecil Solo", *Jurnal Neliti Privat Law*, Vol. IV, No. 2, 2016.

Dewi Iryani Sianturi dan Puguh Aji Hari Setiawan, "Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan", *Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, Vol. 14, No. 6, November, 2023.

Dicky Moallavi Asnil. "UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.2. 2018.

Diza Pratama dan Richard Candra Adam, "Tanggung Jawab Debitur dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 9, No. 1, Januari, 2024.

Eman Suparman. "Harmonisasi Hukum di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional." *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 3.

Ganindha, Ranitya, and Nadhira Putri Indira. "Kewenangan Kurator dalam Eksekusi Aset Debitor pada Kepailitan Lintas Batas Negara." *Arena Hukum* Vol. 13, No. 2. 2020

Gerard McCormack, "Universalism in Insolvency Proceedings and the Common Law." *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 32, No. 2. 2012.

Gunardi Lie Andrian. "*IUS Constituendum* of Cross-Border Insolvency Regulation in ASEAN: Analysis of the UNCITRAL Model Law and the EU Regulation." *Eduvest - Journal of Universal Studies*, Vol. 4 No.6. 2024.

Hamonangan, Alusianto, Muhammad Ansori Lubis, Mhd Taufiqurrahman, and Rudolf Silaban. "Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas." *PKM Maju UDA 2*, no. 1 (2021)

Hari Krishna Karri, Nithya Ramachandran, dan P. Siva Reddy." *Global Financial Resilience: Assessing Opportunities and Challenges in Cross-Border Insolvency under the Paradigms of Universalism and Territorialism.*" *International Journal of Innovative Research in Engineering and Management (IJIREM)*. 2024

Hendri Siahaan, Achmad Fitriani, And Nur Hakim, "Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kajian Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst," *Jirk: Journal Of Innovation Research And Knowledge* 3, No. 8 (2024).

Heri Subagyo dan I Made Kanthika. “Perlindungan Hukum Kreditor Separatis terhadap Jaminan Kebendaan Pihak Ketiga dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Perkara Nomor: 21/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga Sby, juncto Perkara Nomor: 18/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Sby).” *Journal Equitable* Vol.8 No.2 . 2023

Ilham Abbas Herlina dan Andi Risma, "Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit", *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, September, 2022.

Indira Putri. “Kewenangan Kurator dalam Eksekusi Aset Debitor pada Kepailitan Lintas Batas Negara.” *Arena Hukum*, Vol. 13 No. 2. 2020.

Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas, "Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer", *Notarius*, Vol. 12, No. 2, 2019.

Jechyko Ali Putra Pratama Et Al., “Analisis Terjadinya Penolakan Pkpu Terhadap Pt Garuda Dan Terbebas Dari Pailit Di Masa Pandemic,” *Journal Of Comprehensive Science (Jcs)* 2, No. 6 (2023)

Jihan Amalia. "Urgensi Implementasi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia Dan Singapura." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Vol. 2, No.2. 2019.

Julinda Beqiraj, Lawrence McNamara, “*International Access to Justice: Barriers and Solutions*. Bingham Centre for the Rule of Law Report”. International Bar Association.

Moh. Harish Mubrizul Haq. “Model Law on Cross Border Insolvency dalam Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas di Indonesia.” *Jurnal Negara dan Keadilan* Vol. 12, No.2. Agustus 2023

Mohammad Harish Mubrizul Haq. “Model Law on Cross Border Insolvency dalam Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas di Indonesia.” Disertasi PhD, Universitas Islam Malang, 2023.

Monica Gloria. “Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Panorama Hukum* Vol.6 No.1. 2021

Muhammad Siddiq Nugroho. “Perlindungan Hukum bagi Tim Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Putusan No. 52/Pdt.Sus-PKPU/2018).” . Vol.52.2018

Nabil Ratu Utami et al. “Debt Restructuring Strategy in the Case of Garuda Indonesia: PKPU Approach.” *Doktrina: Jurnal of Law* Vol. 7. April 2024.

Nadia Nuraini Hasni, Ansari, Teuku Syahrul, Ella Nurlailasari. “Prinsip Teritorial dan Kaitannya dengan Cross Border Insolvency dalam Hukum Kepailitan di Indonesia.” *Yustisi*, Vol. 12 No.1 2025.

Ni Nyoman Julianti, I Made Arjaya, dan Ida Ayu Putu Widiati. "Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby)." *Jurnal Analogi Hukum*. Vol.3 No.1. 2021

Nico Tri Saputra , “Perlindungan Hukum bagi Kurator dalam Proses Pergantian Kurator.” *Action Research Literate* Vol.8, No. 5. 2024.

Nico Tri Saputra, L Alfies Sihombing, And Eka Ardianto Iskandar, “Perlindungan Hukum Bagi Kurator Dalam Proses Pergantian Kurator Berdasarkan Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu,” *Action Research Literate* 8, No. 5 (2024)

Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7, No. 1, 2018.

Noor Azizah. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2020.

Nugraha Budi Raharja dan Ariawan Gunardi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, Desember, 2023.

Okta Putri Setia Ningtias. “Kewenangan Kurator dalam Mengeksekusi Aset Debitor pada Kepailitan Lintas Batas (Cross Border Insolvency).” *Al Qodri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 22 No. 2. 2024.

Olivia Rizka Vinanda, Nabila Septiyani , Aliyah, Dini, Huda, Miftahul, Saskia
Amanda Meta . “Urgensi Harmonisasi Hukum Perdata Nasional dengan
Dinamika Hukum Global.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 1 No. 10.

P Purwanto. “Subyek Hukum Korporasi dalam Permohonan Kepailitan...” (data
tidak lengkap).

Pailit Nominee, Oleh Kurator, And M Ihsan Kamil, “Sita Harta Milik Orang Asing
Yang Di Atas Namakan Debitor Pailit (” 2, No. 1 (2019).

Peter, Eric, Rafles Rico, And Deviana Yuanita. "Kegagalan Terhadap PT Hanson
International Yang Telah Dinyatakan Pailit Setelah Gagal Dalam PKPU."

Prayogo Hindrawan, Sunarmi, Budiman Ginting, dan Dedi Harianto, "Tanggung
Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam
Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit", *Locus Journal of Academic
Literature Review*, Vol. 2, No. 8, Agustus, 2023.

Putu Eka Trisna Dewi . "Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga dalam Mengadili
Perkara Kepailitan." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* Vol.5 No.1.2023

Putu Eka Trisna Dewi . “Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”
Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 1, No. 2. 2019

Quantri H Ondang, "Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Lex Et Societatis*, Vol. 5, No. 7, 2017.

R. Besse Kartoningrat, Peter M. Marzuki, M. Hadi Shubhan, "Prinsip Independensi dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit", *RechtIdee*, Vol. 16, No. 1, Juni, 2021.

Rafał Mańko, "Cross-border Insolvency Law in the EU". Library Briefing, Library of the European Parliament, 2013.

Raharja, Nugraha Budi, and Ariawan Gunardi. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2009-2016.

Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan", *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 6, No. 1, Juni, 2021.

Ramadina, Ninda Putri, Berliani Gemina Shafarza, Sani Azzahra, Nyulistiowati Suryanti, and Deviana Yuanitasari. "Tinjauan Yuridis Kepailitan Studi Kasus PT. Kertas Leces pada Putusan Nomor 1/K/Pdt. Sus-Pailitan/2020." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023)

Ran Chakrabarti, "Key Issues in Cross-Border Insolvency." *National Law School of India Review*, Vol. 30 No.2, 2018.

Ratu Alawiyah Rifani, Fauziah, dan Muhammad Fahrudin. "Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam

Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)." *Jurnal Jurisdictie*, Vol. 3, No. 2. 2021

Rio Adithya. "Analisis Pembentukan ASEAN Cross Border Insolvency Regulation sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di ASEAN." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No.1, Desember 2021.

Riza Fibriani, "Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19 Legal Review Of Cooperative Bankruptcy When Default In The Covid-19 Pandemic Period Yang Dilandasi Dengan Jiwa Dan Semangat Kekeluargaan Yaitu Koperasi . 1 Koperasi 2020 Tentan"

Riza Fitriani. "Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar pada Masa Pandemi Covid-19."

Rizal Syah Nyaman dan Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi, "Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Santi Widiyari, Yuyut Prayuti, And Arman Lany, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jda: Journal Delik Adpertisi* Vo. 3, No. 1 2024.

Serlika Aprita Sarah Qosim. "Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 7, No. 2. 2022

Serlika Aprita, "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 14, No. 1, 2019.

Shania Khairunnisa, Arman Nefi. "Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat (Studi Kasus: Kepailitan PT Apol dan PT Berlian Tangker)." *Jurnal Hukum To-Ra* Vol. 9, No. 2, 2023.

Simaremare Tjoanda , dan Saija. "Penerapan Kelangsungan Usaha bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang."

Siti Khairunnissa, "Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara dalam Perbandingan Hukum Perdata Internasional antara Indonesia dan Malaysia", *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2024.

Siti Rahma Novikasari, Nurmalita Ayuningtyas Harahap. "Pemenuhan Hak atas Informasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah: Studi Pengadaan Tanah Taman Budaya Sleman." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol.28, No. 2. 2021.

Siti Sarra, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Orang Asing Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

Sitti Khairunnissa. “Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara dalam Perbandingan Hukum Perdata Internasional antara Indonesia dan Malaysia.”

Recht Studiosum Law Review, Vol. 3 No. 1, 2024

Sonny Dewi dan Lenny Nadriana, "Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris Dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit Di Indonesia", *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Suhaila Zlkifli , “Kedudukan Kreditur Pasca Putusan Pernyataan Pailit Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu” 01, No. 01 (2024).

Tata Wijayanta, Sheva Trisanda Adistia, Rado. F Leonardus, B. E Hermawan, “Should Indonesia Learn from Malaysia and Singapore’s Cross-Border Insolvency Asset Settlements?” *Yustisia*, Vol. 13 No. 1 , 2024.

Teddy Anggoro, “Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, No. 3 (2021)

Udin Silalahi, Beatrix Tanjung, "Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Volume Dharmasisya, Jurnal Fakultas, And Ricky Endrie Saragih, “” Dharmasisya ” Jurnal Program Magister Hukum Fhui Peningkatan Pendapatan Daerah” 2, No. December (2022).

Widiasari, Santi, Yuyut Prayuti, Arman Lany. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *JDA: Journal Delik Adpertisi* Vol. 3, No. 1 2024.

Yusuf August Mulki, & Muhammad Irgi Maulana. “Peran Pancasila dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia.” *Indigenous Knowledge*, Vol. 1 No.1

Zahra Athirah, Heru Sugiyono. “Kepastian Hukum Putusan Pengesahan Homologasi dalam Perkara Kepailitan.” *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 4, No. 3. 2023.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Buku I Pedoman Penyelesaian Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

UNCITRAL. *Model Law on Cross-Border Insolvency Law with Guide to Enactment and Interpretation.*

D. Website:

"Pengadilan Khusus merupakan pengadilan dengan kewenangan untuk menangani, memeriksa, dan memutus perkara tertentu." Dilansir dari:

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1816-pengadilan-khusus>

Akta 78 Sumber Sengketa Keluarga Arsjad Rasjid 7 Ahli Waris Krama Yudha, ini isinya. Dilansir dari: <https://insight.kontan.co.id/news/akta-78-sumber-sengketa-keluarga-arsjad-rasjid-ahli-waris-krama-yudha-ini-isinya?payment=success>

Babak Baru Perkara Arsjad Rasjid vs Ahli Waris Krama Yudha. Dilansir dari: <https://money.kompas.com/read/2024/06/27/124825226/babak-baru-perkara-arsjad-rasjid-vs-ahli-waris-krama-yudha-kuasa-hukum-ajukan?page=2>

Teori Kepastian Hukum oleh Jan M Otto. Dilansir dari https://www.Gramedia.Com/Literasi/Teori-KepastianHukum/#Teori_Kepastian_Hukum_Menurut_Jan_M_Otto

"Pengadilan Khusus merupakan pengadilan dengan kewenangan untuk menangani, memeriksa, dan memutus perkara tertentu." Dilansir dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1816-pengadilan-khusus>

Diputus Pailita, Ahli Waris Krama Yudha Ajukan Pailit. Dilansir dari Metro TV : <https://www.metrotvnews.com/read/NxGCzWo4-diputus-pailit-ahli-waris-pt-krama-yudha-ajukan-kasasi>

Pengadilan Khusus Dilansir dari: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1816-pengadilan-khusus>



Dilansir dari EMM (Essentials of Migration Management)

<https://emm.iom.int/handbooks/human-rights-migrants-overview/state-sovereignty-and-human-rights>